



# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN (LPPKaI)**

## **KALURAHAN TIMBULHARJO**

**Tahun Anggaran 2024**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Akhir Tahun Anggaran 2024 Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran”. Kami sadari sepenuhnya, bahwa dengan dukungan dari segenap komponen yang ada di Kalurahan Timbulharjo, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Akhir Tahun Anggaran 2024 sesuai realisasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dengan memperhatikan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak, sehingga proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Akhir Tahun Anggaran 2024 Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan-Nya. Amin.



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN .....	1
B. VISI MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN .....	2
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	3
BAB II PROGRAM KERJA .....	8
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN .....	8
B. BIDANG PEMBANGUNAN KALURAHAN .....	13
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.....	16
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	16
E. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN .....	17
BAB III PENUTUP .....	28
A. KESIMPULAN.....	28
B. SARAN .....	29

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN (LPPKal)**  
**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan bahwa kewenangan Kalurahan meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Kalurahan.

Lurah berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa bahwa “Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepala bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”. Oleh karenanya, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi laporan semua kegiatan Kalurahan berdasarkan kewenangan Kalurahan yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota dalam jabatan Lurah.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dalam rangka melaksanakan amanat tersebut Pemerintah Kalurahan Timbulharjo telah menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

(LKPPKal) Tahun 2024 yang merupakan informasi capaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan, baik keberhasilan maupun kendala dan solusi pemecahannya serta sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, namun demikian setidaknya pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran atas pelaksanaan program kegiatan yang berupa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Timbulharjo. Semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban atas kinerja dan peningkatannya dimasa yang akan datang.

## **B. VISI MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN**

### **1) Visi**

Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan atau yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Visi Lurah Kalurahan Timbulharjo untuk enam tahun mendatang (2021 - 2026) adalah ***Terwujudnya Desa Timbulharjo ADEM (Aman Damai Eksis Makmur).***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Timbulharjo berkeinginan mewujudkan kehidupan kalurahan yang aman dan damai sebagai pengejawantahan suasana kalurahan yang asri. Adapun eksis merupakan pengejawantahan dari hadirnya pelayanan pemerintah yang bersih, transparan dan bertanggung jawab sehingga dapat dipastikan pelayanan kalurahan sampai tingkat akar rumput dapat berkonsep desa bangun. Makmur sebagai kata penutup merupakan harapan dari upaya-upaya sebelumnya, masyarakat adil dan makmur dalam berkehidupan di kalurahan tempat kelahirannya.

### **2) Misi**

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Kalurahan Timbulharjo dalam RPJMKal Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan aparatur pemerintah desa yang professional dan amanah sehingga tercipta Desa Swadaya dan Mandiri;
- b) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang ada di Desa sesuai yang diamanatkan undang-undang;
- c) Melaksanakan pembangunan yang berkeadilan, berkesinambungan, dan merata sesuai aspirasi masyarakat dengan asas kejujuran, berkeadilan, dan transparasi;
- d) Mewujudkan masyarakat yang berakhhlakul karimah dilandasi dengan iman dan taqwa serta mewujudkan pemerintahan yang rahmatan lil'alamin;
- e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan mengoptimalkan badan usaha milik kalurahan (BUMKal) berbasis potensi ekonomi local melalui sektor pertanian dan pariwisata;
- f) Membantu program Gapoktan dan kelompok wanita tani (KWT), serta memberikan bibit yang diinginkan kelompok tani;
- g) Meningkatkan sarana prasarana dari fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kebudayaan di desa;
- h) Meningkatkan pemberdayaan Karang Taruna melalui kegiatan olahraga dan pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana informasi masyarakat desa; dan
- i) Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat, yang meliputi pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan sumber daya alam (SDA), dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

## **C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan Timbulharjo tahun 2024 dilakukan melalui berbagai tahapan :

1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) dengan tujuan :
  - a. Menjabarkan RPJMKal dalam perencanaan untuk Periode 1 Tahun
  - b. Menetapkan Rancangan Kerangka Ekonomi Kalurahan
  - c. Menetapkan Program dan Kegiatan Prioritas

- d. Menetapkan Kerangka Pendanaan
- 2. Proses Penyusunan RPPKal
  - 2.1. Penyusunan
    - a) Melibatkan masyarakat secara langsung
    - b) Berbasis “Perencanaan Partisipatoris”
    - c) Terbuka kepada masyarakat (transparan)
  - 2.2. Penetapannya
    - a) Dilakukan oleh Lurah dan Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan)
    - b) Melalui proses yang saling menghargai perbedaan pendapat
- 3. Hasil
  - 3.1. Mencerminkan kebutuhan masyarakat;
  - 3.2. Mengutamakan kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat lemah (Marginal);
  - 3.3. Meningkatkan kapasitas pemerintah Kalurahan dan masyarakat;
  - 3.4. Adanya jaminan berkelanjutan dari kegiatan Kalurahan yang dibiayai;
  - 3.5. Dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat ;
  - 3.6. Mencerminkan efisiensi dan efektivitas pembangunan di Kalurahan

## **1) Strategi Pembangunan Kalurahan**

Strategi pembangunan jangka menengah Kalurahan Timbulharjo adalah sebagai berikut:

- a) Strategi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang baik:
  - 1. Memantapkan kinerja kepemimpinan yang demokratis, elegan, dan mengedepankan keteladanan.
  - 2. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan penanggulangan KKN.
  - 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pembangunan.
  - 4. Mensinergikan interaksi konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- b) Strategi dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram, dan Dinamis:
  - 1. Memantapkan stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.
  3. Memantapkan budaya politik yang demokratis.
  4. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
  5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.
  6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
  7. Memberdayakan sumber daya perempuan dalam seluruh aspek masyarakat.
  8. Meningkatkan keberdayaan generasi muda dan olah raga.
- c) Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat:
1. Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat.
  2. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat.
  3. Strategi dalam Memantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa.
  4. Meningkatnya kualitas pendidikan agama pada semua jalur, jenis, jenjang pendidikan.
  5. Meningkatnya kualitas penataan, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana keagamaan.
  6. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan ibadah.
- d) Strategi dalam Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Lokal:
1. Meningkatnya pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini mulai dari tingkat keluarga/ rumah tangga.
  2. Reaktualisasi nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu dasar etika sosial dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat.
  3. Meningkatnya sarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya.
- e) Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan:
1. Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan.
  2. Meningkatkan penegakan hukum untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan.
  3. Meningkatkan efektivitas tata ruang wilayah.
  4. Meningkatkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
  5. Strategi dalam meningkatkan Kinerja Pembangunan Dusun.

6. Meningkatkan Keberdayaan dusun dan masyarakat dusun dalam pembangunan.
7. Mengembangkan potensi ekonomi perdusunan.
8. Meningkatkan alokasi dan distribusi pembangunan di tingkat padukuhan.

## **2) Arah Kebijakan Kalurahan**

Kebijakan pembangunan jangka menengah Kalurahan Timbulharjo adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang baik:
  1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.
  2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kalurahan.
  3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
  4. Peningkatan Kapasitas Keuangan Kalurahan.
  5. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Sektor Swasta dalam Pembangunan.
  6. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pembangunan.
- b) Kebijakan Dalam Meningkatkan Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, dan Dinamis:
  1. Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan Masyarakat.
  2. Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM.
  3. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat.
  4. Kehidupan Politik yang Demokratis.
- c) Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia:
  1. Peningkatan Kualitas Pendidikan baik secara formal atau non formal.
  2. Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kuantitas Kesehatan Masyarakat.
  3. Pemantapan Kesetaraan Gender
  4. Peningkatan Keberdayaan Generasi Muda dan Olahraga.
- d) Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat:
  1. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial.
  2. Peningkatan Potensi Perekonomian Kalurahan dan Penanggulangan Kemiskinan.
  3. Perbaikan Informasi Ketenagakerjaan.

4. Pengendalian dan sosialisasi Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga.
- e) Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa:
  1. Peningkatan intensitas Pembinaan agama dan Kehidupan Keagamaan.
  2. Penerapan nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Sosial.
  3. Pengembangan Potensi Umat.
  4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama.
- f) Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuh kembangkan Budaya Lokal:
  1. Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya Lokal.
  2. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal.
  3. Pemantapan Ketahanan Budaya Masyarakat.
- g) Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan:
  1. Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan.
  2. Menyelaraskan Pemantapan dan Pengendalian Ruang dalam Sistem Tata Ruang Yang Terpadu.
  3. Percepatan Pembangunan yang berkelanjutan.
- h) Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Padukuhan:
  1. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan di Tingkat Padukuhan dan Ketahanan Masyarakat Padukuhan.
  2. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Padukuhan.
  3. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Padukuhan.

**BAB II**  
**PROGRAM KERJA**

**A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN**

Adapun jenis penyelenggaraan pemerintah Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya Atas Jumlah
1	2	3	4
1	Peraturan Perundangan undangan	a. Peraturan Kalurahan	7
		b. Peraturan bersama Lurah	-
		c. Peraturan Kepala Kalurahan	6
		d. Keputusan Kepala Kalurahan	77
2	Kependudukan	<b>a. Jumlah Penduduk</b>	
		1) Laki-laki	11.801 jiwa
		2) Perempuan	11.704 jiwa
		3) Jumlah Kepala Keluarga	8.472 jiwa
		4) Jumlah Jiwa	23.505 jiwa
		<b>b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:</b>	
		1) Lulusan Pendidikan Umum	
		a) Taman Kanak-Kanak	2.648 orang
		b) Sekolah Dasar/sederajat	4.369 orang
		c) SMP	3.526 orang
		d) SMU/SMA	6.968 orang
		e) Akademi/ D1-D3	695 orang
		f) Sarjana	1.577 orang
		g) Pascasarjana	S2: 115 orang S3: 14 orang
		2) Lulusan Pendidikan Khusus	
		a) Pondok Pesantren	- orang

		b) Pendidikan Keagamaan	- orang
		c) Sekolah Luar Biasa	- orang
		d) Kursus Keterampilan	- orang
		3) Tidak Lulus/Tidak Sekolah	3.593 orang
	<b>c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian</b>		
	1) Karyawan		
	a) Pegawai Negeri Sipil	468 orang	
	b) TNI/Polri	208 orang	
	c) Swasta	3.018 orang	
	d) Wiraswasta/Pedagang	2.469 orang	
	e) Petani	65 orang	
	f) Tukang	148 orang	
	g) Buruh Tani	5.665 orang	
	h) Pensiunan	347 orang	
	i) Nelayan	2 orang	
	j) Peternak	5 orang	
	k) Jasa	167 orang	
	l) Pekerja seni	33 orang	
	m) Lainnya	5.127 orang	
	n) Tidak bekerja/Penganggur	4.267 orang	
3	Pertanahan	a. Jumlah tanah yang bersertifikat	8.788 buah
		b. Luas tanah kas Kalurahan	102,00 Ha
4	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah aparat Pemerintahan Kalurahan	38 orang
		b. Jumlah Anggota BPD	9 orang
5	Ketentraman dan Ketertiban	<b>a. Pembinaan Hansip</b>	
		- Jumlah anggota	146 orang
		- Jumlah pos kamling	39 pos
		- Jumlah Operasi Penertiban	3 kali
		<b>b. Ketentraman dan Ketertiban</b>	

		- Jumlah Kejadian Kriminal	60 kali
		- Jumlah Bencana alam	1 kali
		- Jumlah Operasi Penertiban	- kali
		- Jumlah Kecelakaan Remaja	2 kali
6	Pembinaan lembagaan kemasyarakatan	1. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	51 orang
		2. TP PKK	54 orang
		3. Karang taruna	40 orang
		4. Jumlah RT	122 RT

### **Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;**

1. Lurah dan Pamong Kalurahan
  - a. Pembayaran penghasilan tetap lurah dan pamong Kalurahan
  - b. Pembayaran tunjangan jabatan lurah dan pamong Kalurahan
  - c. Pembayaran tunjangan suami/istri lurah dan pamong Kalurahan
  - d. Pembayaran tunjangan anak lurah dan pamong Kalurahan
  - e. Pembayaran tunjangan masa kerja
  - f. Pembayaran tunjangan kesehatan lurah dan pamong Kalurahan
  - g. Pengisian Pamong Kalurahan
2. Operasional Kalurahan
  - a. Operasional perkantoran
  - b. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - c. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - d. Pengadaan peralatan kerja
  - e. Pemeliharaan rutin balai Kalurahan
  - f. Rehabilitasi bangunan aula Kalurahan
  - g. Intensifikasi PBB
3. Bamuskal
  - a. Pembayaran tunjangan Bamuskal
  - b. Operasional Bamuskal
4. Data Kalurahan
  - a. Sistem Informasi Desa
  - b. Penyusunan profil Kalurahan
  - c. Penyusunan monografi Kalurahan
5. Musyawarah Kalurahan
  - a. Penyelenggaraan musyawarah Kalurahan

- b. Penyelenggaraan musrenbang Kalurahan
- c. Penyelenggaraan penggalian gagasan/musyawarah padukuhan
- 6. Keamanan Kalurahan
  - a. Operasional linmas Kalurahan
  - b. Operasional piket malam Kalurahan
- 7. Peraturan Kalurahan
  - a. Penyusunan raperkal tentang RKPKal
  - b. Penyusunan raperkal tentang perubahan RKPKal
  - c. Penyusunan raperkal tentang review RPJMKal
  - d. Penyusunan raperkal tentang APBKal
  - e. Penyusunan raperkal tentang APBKal Perubahan
  - f. Penyusunan raperkal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKal
  - g. Penyusunan raperkal tentang RKPKal
  - h. Penyusunan raperkal tentang BUMKal
- 8. Pertanahan
  - a. Administrasi Tanah Kas Kalurahan
- 9. Kemasyarakatan
  - a. Operasional Rukun Tetangga
- 10. Laporan
  - a. Penyusunan LKPPKal dan LKPJ akhir tahun
  - b. Laporan keuangan triwulan dan semesteran

### **Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;**

#### **1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan**

##### **Masyarakat**

- a. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kalurahan
- b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas FPRB

#### **2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**

- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
- b. Penyelenggaraan Festival Kesenian. Adat/Kebudayaan
- c. Pembinaan Bidang Keagamaan

#### **3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan

- b. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan

#### **4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**

- a. Pembinaan LKM Kalurahan/ LPM/ LPM kalurahan
- b. Pembinaan PKK
- c. Pembinaan Ketua RT
- d. Pembinaan Karang Taruna

### **Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;**

#### **1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**

- a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- d. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (Gapoktan, P3A/Peternakan)
- e. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

#### **2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga**

- a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- b. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- c. Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga

#### **4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

- a. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi

#### **5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**

- a. Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL

#### **6. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**

- a. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa

### **Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan**

#### **1. Penanganan Keadaan Mendesak**

- a. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD)

## **B. BIDANG PEMBANGUNAN KALURAHAN**

### **Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;**

#### **1. Sub Bidang Pendidikan**

- a. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
- b. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan PAUD

#### **2. Sub Bidang Kesehatan**

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan
- b. Penyelenggaraan Posyandu
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu
- f. Pembinaan Kampung KB
- g. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
- h. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi dan Nifas
- i. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN)

#### **3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahan/ Balai Kemasyarakatan
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, Selokan,dll)

#### **4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman**

- a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin

#### **5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**

- a. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan
- b. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah
- c. Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah

#### **6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**

- a. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana:

Berkaca pada parameter jenis kegiatan di Sistem Keuangan Kalurahan tentunya bidang ini tidak semata mata hanya pembangunan fisik belaka, namun dalam laporan ini selanjutnya akan lebih memfokuskan pada realisasi pembangunan fisik oleh Pemerintah Kalurahan sebagai salah satu dasar menentukan tingkat keberhasilan dalam kinerjanya. Pembangunan Fisik atau Infrastruktur tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan:
  - a) Penyempurnaan Struktur Kolom dan Pasang Angkur GOR
  - b) Pembangunan GOR Tahap II
  - c) Rehabilitasi Gedung Aula Kalurahan Timbulharjo
  - d) Pembangunan Pendopo KB Amrih Utomo
  - e) Pembangunan Pendopo KB Amrih Utomo (Lanjutan)
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/, yang terdiri dari :
  - a) Perbaikan & Peninggian Atap, Plafon & Instalasi Air Bersih TP PKK 6 Balong
  - b) Renovasi Atap dan Gedung TK PKK 6 Sudimoro
  - c) Pembangunan Kanopi dan Paving Blok TK Kowen Timbulharjo
  - d) Pembangunan Kanopi dan Paving Blok TK PKK Sudimoro
- 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman:
  - a) Pembangunan Corblok Jalan Padukuhan Balong RT.06
  - b) Pembangunan Aspal Jalan Bibis RT.02
  - c) Pembangunan Corblok Mriyan
- 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll), yang terdiri dari :
  - a) Pembangunan Talud Irigasi Pertanian Kowen 2
  - b) Pembangunan Saluran Irigasi Sorogenen
- 5) Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN, yang terdiri dari :
  - a) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Keluarga Miskin (Padukuhan Ngasem, Sorogenen, Sewon, Gabusan dan Gatak)

- 6) Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan, terdiri dari:
- a) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Mriyan
  - b) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Sudimoro
  - c) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Ngentak
  - d) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Dagan
  - e) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Kowen II
  - f) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Ngasem
  - g) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Gabusan
  - h) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Tembi
  - i) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Bibis
  - j) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Sewon
  - k) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Balong
  - l) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Dobalan
  - m) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Gatak
  - n) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Dadapan
  - o) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Kepek
  - p) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Kowen I
- 7) Pembangunan Penerangan Desa/ Dusun, yang terdiri dari :
- a) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Dobalan RT. 03,04,05,07,09
  - b) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kepek RT. 01
  - c) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Ngasem RT.02
  - d) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Ngentak Kidul
  - e) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Dadapan RT.01,07,04,05
  - f) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Bibis RT.08
- 8) Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa yang terdiri dari:
- a) Pembuatan Pintu Pasar Unggas
  - b) Rehabilitasi Los Pasar Kepek
- 9) Pembangunan Gejlik, yang terdiri dari :
- a) Pembangunan 10 Unit Pintu Air (Gejlik) (3 Unit di Pad. Bibis, 3 Unit di Pad.Kowen I, 1 Unit di Pad. Mriyan, 2 Unit di Pad. Dobalan, dan 1 Unit Pad. Sudimoro)
  - b) Penyelenggaraan Angkat Walet Saluran Irigasi

- 10) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, yang terdiri dari :
- Pembangunan Pasar Kuliner Kalurahan Timbulharjo

## **C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**
  - Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
  - Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kalurahan
  - Penguatan dan Peningkatan Kapasitas FPRB
  - Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza Tingkat Kalurahan.
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**
  - Pembinaan Bidang Keagamaan
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan
  - Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**
  - Pembinaan LKM Kalurahan /LPM/LPM kalurahan
  - Pembinaan PKK
  - Pembinaan Ketua RT
  - Pembinaan Karang Taruna

## **D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**
  - Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan)
  - Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
  - Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

- e. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di bidang Pertanian (Gapoktan, P3A/Peternakan)
- f. Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan
- g. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

**2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan**

- a. Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan

**3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga**

- a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- b. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disablae (Penyandang Disabilitas)

**4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

- a. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi

**5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**

- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)  
Persiapan dan Pembentukan Awal BUMKalurahan

**E. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**

Program Kerja yang tercantum dalam RKPKal Tahun 2024, secara rinci dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2024 telah tertuang dalam Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 7 Tahun 2023. Dalam perjalannya APBkal 2024 mengalami perubahan yang diundangkan dalam Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Dalam pelaksanaan program kerja menurut APBKal 2024, secara detail, realisasi penganggaran disertakan dalam Lampiran Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) Akhir Tahun Anggaran 2024 ini.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | Rp 6.791.093.559,00 |
|-------------------------|---------------------|

2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 3.356.198.343,00	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 1.854.532.610,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 544.923.950,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 649.074.400,00	
e. Bidang Tidak Terduga	<u>Rp 180.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja	Rp 6.584.729.303,00	
Surplus/Defisit	Rp 206.364.256,00	
		=====
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 496.508.952,10	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>	
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp 702.873.208,10	
4. SILPA/ SiLPA Tahun Anggaran 2024	Rp. 702.873.208,10	

#### **Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**

##### a. Keberhasilan

1	Kelancaran pembayaran gaji, tunjangan dan honor perangkat Kalurahan, Bamuskal dan tim
2	Kelancaran administrasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan
3	Terlaksananya musyawarah dan koordinasi kegiatan baik di tingkat padukuhan maupun pemerintahan Kalurahan
4	Terselesaikannya update kependudukan baik ditingkat RT maupun tingkat padukuhan se Kalurahan Timbulharjo
5	Terciptanya keamanan dan ketentraman dalam masyarakat
6	Penambahan fasilitas bekerja Pemerintah Kalurahan yang semakin maju dan linear dengan kemajuan zaman, baik software kerja maupun hardware kerja; contoh Komputer, Laptop, Upgrade Program-Progam komputer
7	Terselesaikannya rehab Gedung Aula Kalurahan guna meningkatkan pelayanan publik.
8	Terciptanya suasana pelayanan yang lebih nyaman, baik dilihat dari sisi ruang tunggu maupun sistem pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan. Terbukti adanya Ruang Pelayanan Satu Atap yang lebih memadai dan damai serta semakin cepat selesainya proses pelayanan yang

	diminta oleh setiap pemohon/ masyarakat
9	Berkembangnya dan semakin akuratnya Data Profil Kalurahan maupun Monografi Kalurahan Timbulharjo yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat umum
10	Terciptanya Sistem Keuangan Kalurahan (Siskeudes) yang lebih modernis, kompatibel dan akuntabel sebagaimana diprakarsai oleh Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP)
11	Secara umum terjadi peningkatan kemampuan personil aparatur pemerintah Kalurahan baik disemua janjang sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing
12	Operasional Perkantoran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur tetap maupun aturan teknis yang ada di Pemerintah Kalurahan
13	Regulasi Pemerintah Kalurahan sudah dijalankan secara sistematis sesuai tata kelola dari Kemendagri RI; terbukti adanya produk hukum Kalurahan baik Peraturan Kalurahan (Perdes) maupun Peraturan Bersama Lurah Kalurahan yang hadir dari Forum Musyawarah yang menjunjung tinggi demokrasi, partisipasi dan kesetaraan.

b. Permasalahan Yang Dihadapi Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Permasalahan yang dihadapi dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yaitu:

1	Terbatasnya jumlah personil untuk layanan kependudukan di tingkat Kalurahan
2	Kurangnya etos kerja <i>Team Work</i> dan rasa saling membantu diantara satu personil dan personil lainnya dalam memberikan Pelayanan Terpadu pada masyarakat
3	Rasa <i>Handarbeni</i> pada intansinya sendiri yang masih minim sehingga berimplikasi pada kurangnya semangat membantu tugas dan pekerjaan rekan kerjanya, mengikuti kegiatan diluar jam kerja, dan lain-lain
4	Ritme atas kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan di TA.2024 yaitu Muskal RKP untuk TA berjalan, Penyusunan APBDes/ APBDes Perubahan dll) seringkali berjalan dengan lambat sehingga terjadi

	kelambatan pada realisasi program-program kerjanya.
--	---

c. Upaya Yang Ditempuh Di Bidang Pemerintahan Kalurahan

- Mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan tersebut, ditempuh kebijakan berikut:

1	Memberi tugas tambahan bagi staf yang mampu/menguasai IT
2	Melaksanakan Rapat Koordinasi Staf, Kaur, Kasi, Carik dan Lurah Kalurahan secara kontinyu dan berkelanjutan untuk memberikan motivasi, evaluasi dan dinamisasi pemerintahan
3	Menekankan jiwa korsa satu keluarga disetiap apel pagi maupun secara informal sehari-hari
4	Memperbaiki Time Schedule dan Pelaksanaan setiap kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan

- Permasalahan

1	Kurangnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan
2	Keterbatasan Jumlah Personil Pamong Kalurahan Beserta Staf Serta Keterbatasan Jumlah Tim Pelaksana Kegiatan Dalam Pelaksanaan Pembangunan
3	Kurang terserapnya informasi tentang Dinamisasi Proses Program Penyelenggaraan Pemerintahan didalam Masyarakat.
4	Adanya perbedaan teknis yang terjadi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan perencanaannya
5	Perencanaan program Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih belum optimal

- Upaya yang ditempuh

Adapun upaya untuk penyelesaian permasalahan tersebut adalah :

1	Penguatan Jalinan Komunikasi Antara Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat khususnya melalui Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna dan Unsur lainnya di masyarakat
2	Peningkatan efektivitas kerja
3	Perencanaan dan Evaluasi setiap Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih teliti.
4	Pemerataan semua komponen Pemerintah Kalurahan sebagai Tim Panitia Kegiatan.
5	Optimalisasi perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan baik oleh pihak Pemerintah Kalurahan maupun masyarakat

### **Di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

#### a. Keberhasilan

1	Terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat Kalurahan
2	Dukungan terhadap kegiatan gotong-royong yang telah mengakar dalam masyarakat Kalurahan
3	Terfasilitasinya kegiatan yang menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan, baik itu bagi kaum rois & pemuka agama, PKK, kader sehat, LPMKAL, Gapoktan, KWT, GP3A, P3A maupun Karang Taruna
4	Terfasilitasinya/ bantuan bagi anak yatim, Warga Miskin Dan Kelompok-Kelompok Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
5	Terfasilitasinya kegiatan pengentasan kemiskinan, pengajian/ PSN/ SKJ se-kapanewon Sewon, Safari Tarawih
6	Terfasilitasinya pengamanan kegiatan besar dengan Linmas

7	Terfasilitasinya pemberian bantuan untuk PAUD, TK, layanan Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan KP IBU
---	--

b. Permasalahan

1	Kurangnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Progam Pemerintah Kalurahan dibidang Pembinaan
2	Keterbatasan Jumlah Personil Pamong Kalurahan Beserta Staf Serta Keterbatasan Jumlah Tim Pelaksana Kegiatan Dalam Pelaksanaan Pembangunan
3	Kurang terserapnya informasi tentang Regulasi Progam Pembinaan Masyarakat didalam Masyarakat
4	Adanya perbedaan teknis yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan dengan perencanaannya

c. Upaya yang ditempuh

Adapun upaya untuk penyelesaian permasalahan tersebut adalah :

1	Penjadwalan ulang secara lebih teliti kaitannya dengan pencairan Dana Transfer baik ADD, Dana Kalurahan maupun Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah
2	Peningkatan efektivitas kerja agar program dapat terlaksana dengan baik di tengah keterbatasan jumlah personil.

**Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

a. Keberhasilan

1	Terlaksananya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi berupa pasar kuliner Kalurahan Timbulharjo
2	Terlaksananya pembangunan Gejlik di 10 titik Padukuhan yang ada di Kalurahan Timbulharjo
3	Terlaksananya Pelatihan Hidroponik, Rumah Burung Hantu (RUBUHA) untuk Pengendalian hama Tikus
4	Terlaksananya fasilitasi kegiatan peningkatan fasilitas pembelajaran TK dan PAUD

5	Terlaksananya fasilitasi UMKM guna mendukung Bantul Creative Expo
6	Terlaksananya kegiatan Karang Taruna Kalurahan berupa rangkaian acara PADMA FEST (Badminton cup, Musabaqah Anak Sholeh Timbulharjo, dan Timbulharjo FUN RUN
7	Terlaksananya berbagai pelatihan seperti Workshop peningkatan kapasitas Pamong Kalurahan, Pelatihan Karang Taruna, Peningkatan Kapasitas PKK, Pelatihan Kesehatan Kader Posyandu di Tingkat Padukuhan, Pelatihan Kelompok Tani, Pelatihan Kelompok Wanita.

b. Permasalahan

1	Masih diperlukannya peningkatan SDM bagi semua komponen penyelenggaraan pemerintahan baik staf, Kaur, Kasi, Carik maupun Lurah Kalurahan khususnya peningkatan SDM Operator/ User Siskeudes.
2	Sebagian lembaga Kalurahan secara keorganisasian kurang kuat dalam hal kepengurusan

c. Upaya yang ditempuh

Adapun upaya untuk penyelesaian permasalahan tersebut adalah :

1	Peningkatan efektivitas kerja agar program dapat terlaksana dengan baik di tengah keterbatasan jumlah personil
2	Pendekatan untuk penyegaran dan fungsionalisasi untuk peningkatan kinerja kepengurusan
3	Pengiriman Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan sesuai bidang dan Tupoksinya

Demikianlah uraian mengenai keberhasilan yang telah dicapai, kendala/ permasalahan yang dihadapi serta upaya- upaya yang dilakukan Kalurahan Timbulharjo guna suksesnya pelaksanaan program kerja di empat bidang pada Tahun Anggaran 2024.

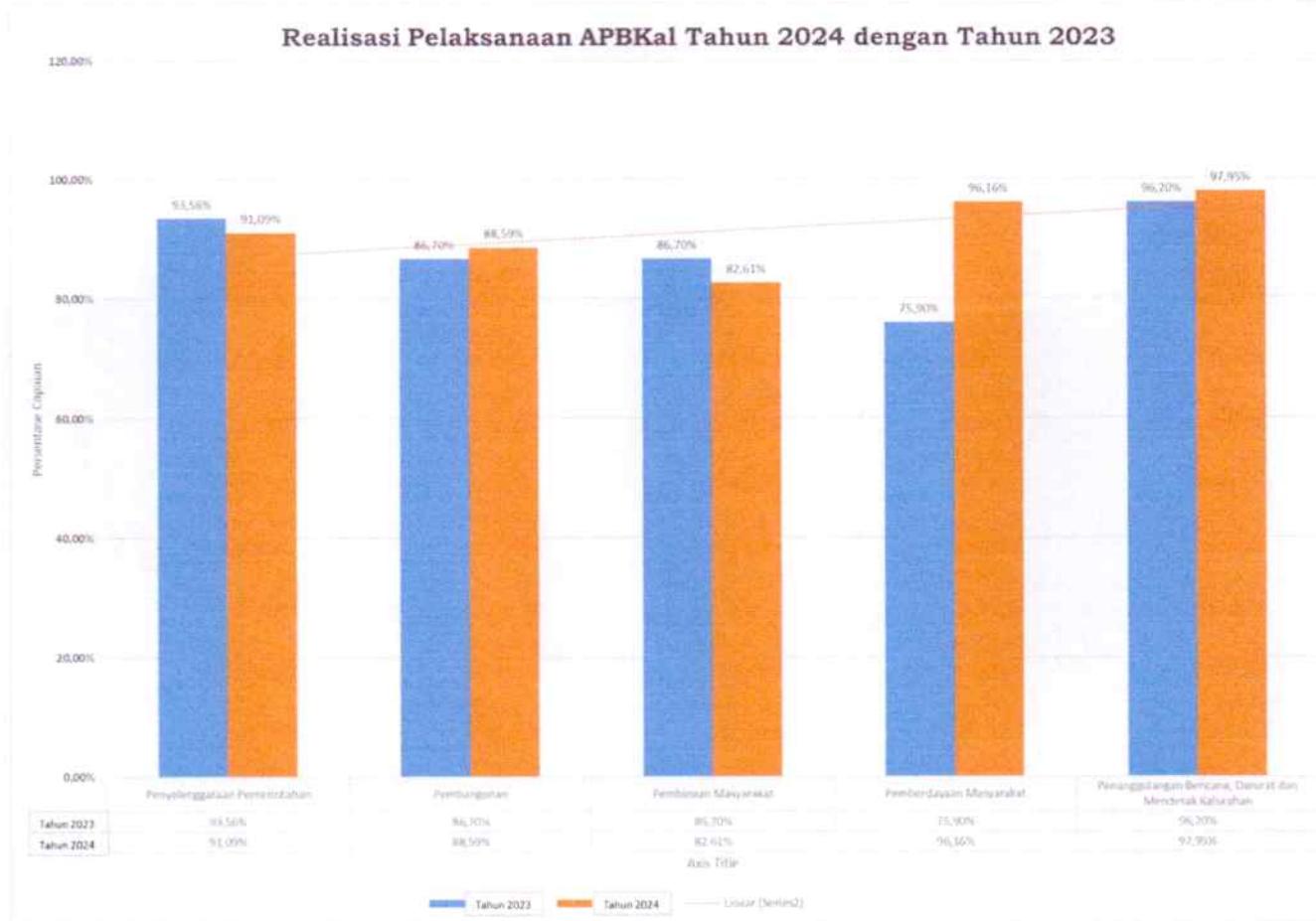
Selanjutnya dalam LPPKal ini juga akan menyajikan pula perbandingan Pencapaian Kinerja Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Timbulharjo dengan Tahun Anggaran sebelumnya atau TA.2023. Dalam melakukan perbandingan ini kita

menggunakan Menggunakan Metode Berfikir Kuantitatif tentang variabelnya dan mengkonversinya pada kegiatan pembangunan fisik yaitu hasil kegiatan pembangunan TA. 2024. Untuk melakukan pengukuran pencapaian kinerja tersebut didasarkan dengan membandingkan antara *Keberhasilan Bidang Pembangunan TA.2023 vs Keberhasilan Bidang Pembangunan TA.2024* sehingga dalam Laporan ini juga kita paparkan tentang keberhasilan kegiatan pembangunan fisik pada TA.2023 sehingga deskripsi penilaian baik buruknya TA.2024 bisa dikomparasikan secara kuantitatif dengan tahun sebelumnya.

Tabel 1.2 Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun 2024

<b>NO.</b>	<b>BIDANG KEGIATAN</b>	<b>RENTANG CAPAIAN</b>		<b>KATEGORI CAPAIAN</b>
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	93,56 %	91,09 %	Baik
2	Pembangunan	86,7 %	88,59 %	Baik
3	Pembinaan Masyarakat	86,7 %	82,61 %	Baik
4	Pemberdayaan Masyarakat	75,9 %	96,16 %	Baik
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	96,2 %	97,95 %	Baik
<b>Rata - Rata Capaian</b>		<b>87,8 %</b>	<b>90,25 %</b>	Baik

Grafik 1.1 Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun 2024



Keberhasilan Bidang Pembangunan Tahun Anggaran 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahan/Balai  
Kemasyarakatan:
  - a. Rehab Gedung Pertemuan Balong RT. 04
  - b. Pembangunan Gedung Serbaguna Sewon RT. 01
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman :
  - a. Paving Blok Depan Penanda Keistimewaan
  - b. Pembangunan Cor blok Jalan Dagan Rt.02
  - c. Pembangunan Cor Blok Jalan dan Tambahan Balok Beton Jembatan
  - d. Pembangunan Cor Blok Jalan Sewon Rt 06
  - e. Pembangunan Cor Blok Jalan Sudimoro RT. 06
  - f. Pembangunan Cor Blok Jalan Keprek RT 07
  - g. Pembangunan Cor Blok dan Talud Jalan Sudimoro RT 03
  - h. Pembangunan Cor Blok Jalan Dadapan Rt 07
  - i. Pembangunan Cor Blok Jalan Ngantak RT. 09

- j. Pembangunan Jalan Lingkungan (Corblok) Mriyan RT. 02
  - k. Pembangunan Plester Beton Jalan Bibis RT 06
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan, dll), yang terdiri dari :
- a. Pembangunan Talud Pengairan Pertanian Dagan RT. 07
  - b. Pembangunan Gorong-Gorong Jomblang RT. 05, Dagan
  - c. Pembangunan Talud Sungai Dobalan RT. 08
  - d. Pembangunan Talud Sungai Ngasem RT. 01
  - e. Pembangunan Talud Sungai Kowen 2 RT. 03
  - f. Pembangunan Talud Sungai Timur Dusun Kowen 1 RT. 03
  - g. Pembangunan Talud Sungai Bulak Kidul Gabusan +(Lanjutan)
4. Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN, yang terdiri dari :
- a. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Keluarga Miskin
5. Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan, terdiri dari:
- a. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Mriyan
  - b. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Sudimoro
  - c. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Ngentak
  - d. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Dagan
  - e. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Kowen II
  - f. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Ngasem
  - g. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Gabusan
  - h. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Tembi
  - i. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Bibis
  - j. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Sewon
  - k. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Balong
  - l. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Dobalan
  - m. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Gatak
  - n. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Dadapan
  - o. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Kepek
  - p. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Pedukuhan Kowen I
6. Pembangunan Penerangan Desa/ Dusun, yang terdiri dari :
- a. Penerangan Jalan Umum Dobalan RT. 05
  - b. Penerangan Jalan Kersan RT. 01, 02, 03
  - c. Penerangan Jalan Bangi RT. 09, 04

- d. Lampu Penerangan Lingkungan Bibis. RT 02
  - e. Lampu Penerangan Lingkungan Bibis RT. 04
  - f. Penerangan Jalan Kampung Kowen I RT. 03
  - g. Penerangan Jalan Kampung Umum Bibis RT. 05
  - h. Penerangan Jalan Umum Gabusan
  - i. Penerangan Kampung Umum Kepek RT. 03
  - j. Penerangan Kampung Umum Kepek RT. 04
  - k. Lampu Penerangan Jalan Gemblangan RT. 08, Dk. Ngentak (KBPM)
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan, yang terdiri dari :
- a. Pengerasan Jalan Homestay Timbulharjo
8. Pembangunan Gejlik, yang terdiri dari :
- a. Pengadaan Dan Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi/ Gejlik
  - b. Penyelenggaraan Angkat Walet Saluran Irigasi
9. Pembangunan Obyek Wisata, yang terdiri dari :
- a. Pembangunan Homestay Timbulharjo
10. Pembangunan Komplek Lapangan, yang terdiri dari :
- a. Pembangunan Sarana Olahraga Serbaguna Kompleks Kalurahan Timbulharjo
  - b. Pembangunan Jogging Track Lapangan Timbulharjo

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Secara umum realisasi keseluruhan program kegiatan di semua bidang kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Timbulharjo pada Tahun Anggaran 2024 sudah baik yaitu mencapai 90,25 %. Hal ini ditandai dengan kenaikan 2,78% dari realisasi tahun 2023.
- Urgensi dari hasil evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Timbulharjo TA.2024 adalah dibutuhkannya peningkatan partisipasi masyarakat pada khususnya dan pihak-pihak terkait lainnya pada umumnya.
- Berdasarkan pada data yang telah disebutkan dalam laporan ini, perlu semangat yang lebih untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang. Tujuan utamanya untuk mewujudkan visi terwujudnya pemerintahan yang bersih, adil dan bertanggungjawab, menuju masyarakat yang agamis, mandiri dan sejahtera, serta terciptanya lingkungan hidup yang hijau, asri dan sehat.
- Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan diperlukan fungsionalisasi yang mantap lembaga- lembaga di Kalurahan seperti: Bamuskal, LPMKal, RT, PKK, TPK, Gapoktan, Dewan Kesenian, Dewan Olah Raga dan sebagainya untuk bersama - sama dengan tokoh masyarakat maupun ulama dalam menciptakan kemajuan Kalurahan Timbulharjo.
- Perlu adanya pembinaan dari instansi yang ada di tingkat lebih atas yaitu kapanewon, dinas/ instansi terkait dan atau narasumber-narasumber ahli lainnya.
- Perlunya kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pamong Kalurahan, Staf dan pihak-pihak yang berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Timbulharjo dalam

meningkatkan pelayanan, memberdayakan diri dan lingkungannya serta memberdayakan masyarakat Kalurahan.

- Penertiban administrasi dalam segala kegiatan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan yang ada di Kalurahan Timbulharjo.
- Berdasarkan Data Realisasi Bidang Pembangunan diatas, secara umum Kegiatan Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Timbulharjo pada TA.2024 mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya atau TA.2023 dengan persentase kenaikan sebesar 2,18%.

## **B. SARAN**

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Tahun Anggaran 2024 ini, kami sadari masih terdapat banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang kami miliki. Untuk itu kami tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritik yang bersifat konstruktif, serta petunjuk/ arahan lebih lanjut.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) ini sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan dalam tahun anggaran 2024. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan atas pelaksanaan otonomi Kalurahan dan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat.

Semoga segala bentuk harapan dan strategi arah Pembagunan Kalurahan Timbulharjo ini dapat menjadikan Pemerataan dalam membangun manusia dan membangun sarana prasarana aktifitas sosial, ekonomi sehingga diharapkan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata menuju kesejahteraan bagi seluruh komponen Kalurahan Timbulharjo.

Tidak lupa Kami ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Bamuskal Timbulharjo yang telah bermusyawarah dan bekerja sama selama ini. Semoga apa yang telah kita gagas dan laksanakan akan membawa Kalurahan Timbulharjo ke arah kemajuan di masa yang akan datang, seiring dengan peningkatan aspek kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Timbulharjo. Tiada gading yang tak retak. Begitu pula dengan segenap aparat Kalurahan dalam melaksanakan tugas,

tentu tak lepas dari kesalahan maupun kekurangan. Saran dan kritik kami harap dengan semangat kebersamaan untuk perbaikan dan penyempurnaan bagi langkah di masa yang akan datang.

Ditetapkan di : TIMBULHARJO  
Pada Tanggal : 17 Maret 2025

